

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA**



NOMOR : 700 / 14. s / LHE / 2020

TANGGAL : 26 Juli 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan Dipayuda, Nomor 10 Telepon (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA INSPEKTORAT

Jl. Dipayuda No. 09 Telp. (0286) 591084 Fax. 591459
BANJARNEGARA 53415

Banjarnegara, 24 Juni 2020
Kepada:

Nomor : 700 / 14.5 / LHE/Insp/2020
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019

Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara
di –

BANJARNEGARA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 700/05 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 090/26-ST/Insp/2020 tanggal 1 April 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) pada **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara**, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar **62,69** dengan kategori **B** atau **Baik** dengan interpretasi Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam hasil evaluasi.

5. **Gambaran umum Sistem AKIP**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, definisi Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan Sistem AKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem AKIP adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

6. **Obyek Evaluasi**

Data dan dokumen standar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang menjadi obyek evaluasi SAKIP terdiri atas:

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2017-2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menyusun Renstra periode tahun 2017-2022 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/1071/Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Dokumen *breakdown* IKU (*cascading*) tahun 2019;
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019;
- e. RKA murni dan perubahan 2019;
- f. DPA murni dan perubahan 2019;
- g. Perjanjian Kinerja 2019 dan perubahannya (Eselon II-IV dan Staf);
- h. Rencana aksi pencapaian kinerja 2019 yang di break down per triwulan;
- i. Dokumen pengukuran kinerja atas rencana aksi (Triwulan I-IV, Eselon II-IV dan Staf) Tahun 2019;
- j. Dokumen laporan evaluasi pengukuran kinerja tahun 2019
- k. LKjIP 2019;
- l. Print screen e SAKIP.

7. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 memperoleh nilai 62,69 dengan kategori B.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	19,49
B	Pengukuran Kinerja	25%	14,06
C	Pelaporan Kinerja	15%	9,97
D	Evaluasi Internal	10%	5,84
E	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	13,33
Penilaian		100%	62,69

Penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **19,49** dari bobot **30%**. Evaluasi atas perencanaan kinerja terdiri dari 2 (dua) sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Perencanaan Strategis	10%	5,49
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan	20%	14,00
Penilaian		30%	19,49

Penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja meliputi penilaian terhadap pemenuhan, kualitas serta implementasi Renstra dan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT dan PK). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan proses perbaikan dengan cukup baik terutama dalam hal perencanaan strategis, namun demikian masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Renstra belum dilengkapi dengan ukuran (indikator) dan target keberhasilan tujuan;
2. Renstra belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja tahunan, RKT tidak sepenuhnya memuat sasaran dan target kinerja sebagaimana Renstra tahun berkenaan;
3. Rencana Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
4. Monitoring atas pencapaian rencana aksi yang dilakukan hanya sebatas penyerahan atau pengumpulan data hasil pengukuran kinerja;
5. Pemanfaatan rencana aksi hanya sebatas pelaporan dan pemenuhan dokumen, belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **14,06** dari bobot penilaian sebesar **25%**. Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan pengukuran	5%	2,81
II.	Kualitas pengukuran	12,5%	7,81
III.	Implementasi pengukuran	7,5%	3,44
Penilaian		25%	14,06

Komponen yang dinilai dalam pengukuran kinerja mencakup pemenuhan, kualitas serta implementasi IKU yang telah diformalkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan proses perbaikan dengan cukup baik dalam pengukuran kinerja dibandingkan kondisi tahun 2018 terutama dalam kualitas dan implementasi pengukuran kinerja.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kinerja atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala;
2. Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.
3. Dokumen penganggaran belum mencantumkan IKU sebagai *ultimate outcome* atau *impact*.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **9,97** dari bobot penilaian sebesar **15%**. Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan pelaporan	3%	2,81
II.	Penyajian informasi kinerja	7,5%	5,36
III.	Pemanfaatan informasi kinerja	4,5%	1,80
Penilaian		15%	9,97

Hasil evaluasi untuk komponen ini meliputi penilaian terhadap dokumen LKjIP. Dokumen LKjIP Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah disusun. Dokumen LKjIP menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya baik target kinerja maupun keuangannya.

Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pelaporan kinerja adalah:

1. Laporan kinerja belum menyajikan:
 - a) Data dan analisis efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan;
 - b) Data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran.
2. Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja. Hal tersebut disebabkan penyusunan LKjIP dilakukan sekedar pemenuhan dokumen, sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi.

d. Evaluasi Internal

Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kinerja memperoleh nilai **5,84** dari bobot penilaian sebesar **10%**. Evaluasi atas evaluasi kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Pemenuhan evaluasi	2,00	1,63
II.	Kualitas evaluasi	5,00	2,71
III.	Pemanfaatan evaluasi	3,00	1,50
Penilaian		10,00	5,84

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pemantauan terkait kemajuan pencapaian kinerja beserta hambataannya termasuk melakukan evaluasi atas program dan pelaksanaan rencana aksi, hal tersebut tercermin dari kecukupan dokumen yang disajikan, namun demikian terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas program belum menilai keberhasilan/dukungan program terhadap capaian kinerja sasaran;
2. Evaluasi atas program belum memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
3. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;
4. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum memberikan saran alternatif untuk perbaikan kinerja setiap periode.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai **13,33** dari bobot penilaian sebesar **20%**. Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I.	Kinerja yang dilaporkan (output)	7,5%	5,00
II.	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	12,5%	8,33
Penilaian		20%	13,33

Dari informasi yang disajikan dalam LKjIP, Informasi capaian *output* dan *outcome* telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan.

8. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan
 - 1) Menetapkan ukuran (indikator) dan target keberhasilan tujuan dalam Renstra;
 - 2) Memastikan kesesuaian sasaran dan target kinerja RKT dengan Renstra tahun berkenaan;

- 3) Memastikan seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran (RKA, DPA) telah direncanakan dalam RKY
- 4) Agar Rencana Aksi dimanfaatkan dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta dilakukan evaluasi internal atas hasil pengukuran kinerja secara berkala.

b. Aspek Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja atas pelaksanaan Rencana Aksi agar dilakukan secara periodik.
- 2) Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.
- 3) Memastikan konsistensi implementasi IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

c. Aspek Pelaporan Kinerja

- 1) Agar Laporan Kinerja menyajikan data dan analisis efisiensi sumber daya serta data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran;
- 2) Agar LKjIP dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi, Informasi yang disajikan dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.

d. Aspek Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi atas program agar dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan/dukungan program terhadap capaian kinerja sasaran;
- 2) Hasil evaluasi atas program agar memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- 3) Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;
- 4) Hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar memberikan saran alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan kinerja.


e. Aspek Capaian Kinerja

Meningkatkan keandalan informasi capaian kinerja yang bersifat *output* maupun *outcome*.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam tahun 2019.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA



ACHMAD, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198503 1 006

